

**PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PENGRAJIN BATIK
(Studi di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
Kabupaten Sidoarjo dan Industri Kecil Kampoeng Batik Jetis Kabupaten Sidoarjo)**

Yesy Yusro Kumalasari, Agus Suryono, Mochamad Rozikin

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: yesy_kumalasari@yahoo.com

Abstract: *Coaching and Empowerment Batik Craftsmen (Studies in the Department of Cooperatives, SMEs, Industry, Commerce and Energy and Mineral Resources Sidoarjo District and Small Industry Kampoeng Batik Jetis Sidoarjo District). Economic conditions in Indonesia, one of which is supported by the Small and Medium Enterprises (SMEs). The existence of a small business can be a driver of the economy. Sidoarjo is a city that SMEs have a considerable amount of industry, one of which is a small industry batik craftsmen located in Kampoeng Batik Jetis. Required commitment of the government to develop and solve the problems of small industry batik craftsmen. Efforts are made Department of Cooperatives, SMEs, Industry, Commerce and Energy and Mineral Resources Sidoarjo District is by coaching and empowerment. The results of coaching and empowerment conducted by Diskoperindag and EMR Sidoarjo District already provides benefits and good impact for batik craftsmen. However, the impact is not evenly distributed either perceived by all of batik craftsmen because yet thorough guidance and empowerment is done to all the craftsmen batik in Kampoeng Batik Jetis.*

Keywords: *coaching, empowerment, small industry*

Abstrak: *Pembinaan dan Pemberdayaan Pengrajin Batik (Studi di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo dan Industri Kecil Kampoeng Batik Jetis Kabupaten Sidoarjo). Kondisi perekonomian di Indonesia salah satunya ditopang oleh Usaha Kecil Menengah (UKM). Keberadaan usaha kecil dapat menjadi penggerak perekonomian masyarakat. Sidoarjo merupakan kota UKM yang memiliki jumlah industri yang cukup banyak, salah satunya adalah industri kecil pengrajin batik yang terletak di Kampoeng Batik Jetis. Diperlukan komitmen pemerintah untuk mengembangkan dan mengatasi permasalahan industri kecil pengrajin batik. Upaya yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo yaitu dengan pembinaan dan pemberdayaan. Hasil dari pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Diskoperindag dan ESDM Kabupaten Sidoarjo sudah memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi pengrajin batik. Akan tetapi, dampak baik tersebut belum merata dirasakan oleh seluruh pengrajin batik dikarenakan pembinaan dan pemberdayaan belum menyeluruh dilakukan kepada semua pengrajin batik di Kampoeng Batik Jetis.*

Kata kunci: *pembinaan, pemberdayaan, industri kecil*

Pendahuluan

Pembangunan merupakan suatu usaha atau proses perbaikan yang tiada akhir untuk berubah menjadi lebih baik lagi dan demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup masyarakat. Menurut Slamet yang dikutip dalam Mardikanto dan Soebiato (2012, h.6) untuk tercapainya tujuan-tujuan pembangunan, maka kegiatan pembangunan memerlukan “teknologi-teknologi” tertentu. Pengertian teknologi tersebut adalah kebijakan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat sampai dengan petunjuk teknis

dan petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan instansi yang terendah.

Potensi sumber daya yang besar yang dimiliki oleh Indonesia salah satunya adalah potensi sumber daya ekonomi. Kondisi perekonomian di Indonesia salah satunya ditopang oleh perekonomian Usaha Kecil Menengah (UKM). Menurut Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo yang dikutip dari situs www.kabarbisnis.com bahwa UKM ini memberikan kontribusi hingga 99% bagi perkembangan ekonomi Indonesia yang pada tahun lalu mencapai 6,2% dan sisanya 1% dalam bentuk usaha besar. UKM merupakan

satu sektor yang mampu bertahan dalam situasi ekonomi global yang sedang tertekan.

Kabupaten Sidoarjo merupakan kota UKM yang terbanyak di Indonesia. Salah satu industri kecil yang khas dari Sidoarjo yaitu Batik Tulis Sidoarjo. Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Menurut Musman dan Arini (2011, h.1) bahwa batik Indonesia merupakan suatu keseluruhan teknik, teknologi serta pengembangan motif dan budaya yang terkait, yang oleh UNESCO ditetapkan sebagai warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Non-Bendawi sejak Oktober 2009.

Pada tanggal 3 Mei 2008 Bupati Sidoarjo meresmikan Jetis sebagai daerah industri batik dan diberi nama "Kampoeng Batik Jetis". Industri kecil batik di Kampoeng batik Jetis pada tahun 2007 mengalami penurunan produksi yang mengakibatkan pengrajin hampir gulung tikar dalam usahanya. Hal tersebut karena sumber daya manusia dari pengrajin batik di Kampoeng Batik Jetis sangat rendah sehingga berdampak pada usaha yang dijalani. Seperti yang diungkapkan oleh Wulandari (2011, h.67) bahwa tantangan besar yang dihadapi oleh industri batik di Indonesia adalah sumber daya manusia.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan. Jika dilihat dari peran pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, maka sudah jelas bahwa perlunya peran pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap sektor industri kecil agar tetap berperan dalam mewujudkan perekonomian nasional yang semakin baik dan seimbang. Pembinaan dan pemberdayaan merupakan cara yang dapat ditempuh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM (Diskoperindag). Diskoperindag dan ESDM Kabupaten Sidoarjo melakukan pembinaan dan pemberdayaan dengan berbagai pelatihan dan fasilitasi yang diberikan guna untuk mengembangkan industri kecil pengrajin batik. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah yang dibahas yaitu tentang pembinaan dan pemberdayaan pengrajin batik yang dilakukan oleh Diskoperindag dan ESDM Kabupaten Sidoarjo.

Tujuan penelitian untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pembinaan dan pemberdayaan pengrajin batik Kampoeng Batik Jetis yang dilakukan oleh Diskoperindag dan ESDM Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan sebagai referensi bagi pembaca secara umum maupun para praktisi akademik khususnya.

Tinjauan Pustaka

1. Pembinaan

Menurut S. Hidayat (1985, h.26) pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan berencana, teratur dan terarah, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan subjek didik dengan tindakan-tindakan dan pengarahan, bimbingan, pengembangan, stimulasi dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut A. Mangunhardjono (1986, h.14) terdapat tiga fungsi pembinaan, yaitu: (1)Penyampaian informasi dan pengetahuan, (2)Perubahan dan pengembangan sikap, dan (3) Latihan dan pengembangan tentang kecakapan dan keterampilan. Dari fungsi pembinaan tersebut dapat digunakan salah satu atau pun ketiganya.

Melalui pembinaan seseorang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan yang telah mereka dapat. Pembinaan merupakan suatu cara seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari pembinaan menurut A. Mangunhardjono (1986, h.13) adalah: (a) Melihat diri dan pelaksanaan hidup serta kerjanya, (b) Menganalisis situasi hidup dan kerjanya dari segala segi positif dan negatifnya, (c) Mencari masalah hidup dan masalah dalam kerjanya, (d) Mencari hal yang sebaiknya diubah dan diperbaiki, (e) Merencanakan sasaran dan program dalam hidup dan kerjanya setelah mengikuti pembinaan.

2. Pemberdayaan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 ayat 8 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Menurut Sulistiyan (2004, h.80) tujuan dari adanya pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Proses pemberdayaan masyarakat menurut Prijono yang dikutip dalam Suryono (2006, h.147) dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: tahap inisiasi, tahap partisipatoris, dan tahap emansipatoris. Terdapat

model-model pemberdayaan menurut Suryono dan Trilaksono (2008, h.26) beberapa model pemberdayaan masyarakat, antara lain: (1) Model *People Centre Development*, (2) Model Lingkaran Setan Kemiskinan Versi *Nurkse*, (3) Model Kemitraan, (4) Model Grameen Bank, (5) Sri mahila SEWA Sahakari Bank.

3. Industri Kecil

Menurut Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1984 tentang Industri, Industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang yang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Menurut Tambunan (2002, h.73) masalah yang sering dihadapi oleh industri kecil yaitu sebagai berikut: masalah kesulitan pemasaran, masalah keterbatasan finansial, masalah keterbatasan sumber daya manusia, masalah bahan baku, dan masalah keterbatasan teknologi.

4. Peran Pemerintah dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Kecil

Jika dilihat dari peran pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil ini, mengatakan bahwa sudah jelas perlunya peran pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam sektor industri kecil agar tetap berperan dalam mewujudkan perekonomian nasional yang semakin baik dan seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada pasal 14 yang dapat dilakukan pemerintah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu dalam bentuk: (1) Fasilitasi permodalan, (2) Dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi, (3) Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi serta lain-lain jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (4) Pelibatan dalam pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar, (5) Pelibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah, (6) Fasilitasi HAKI.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan

kualitatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Sidoarjo dan situs penelitian di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo. Data primer diperoleh dengan wawancara. Data sekunder diperoleh dengan mencari dokumen-dokumen yang sesuai tema penelitian.

Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah: (1)Pembinaan dan Pemberdayaan pengrajin batik di Kampoeng batik Jetis yang dilakukan Diskoperindag dan ESDM Kabupaten Sidoarjo, (2) Manfaat dan dampak yang dihasilkan dari pembinaan dan pemberdayaan pengrajin batik dan (3) Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi dalam pembinaan dan pemberdayaan pengrajin batik di Kampoeng Batik Jetis Kabupaten Sidoarjo.

Analisis data menggunakan metode analisis model interaktif yang menurut *Miles* dan *Huberman* yang dikutip Sugiyono (2013, h.91) ada tahapan yang harus dilalui yakni: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Pembahasan

1. Pembinaan dan Pemberdayaan Pengrajin Batik di Kampoeng Batik Jetis yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo

Sidoarjo yang merupakan kota UKM memiliki jumlah industri kecil yang dapat menjadi kegiatan ekonomi masyarakat Sidoarjo. Dari banyaknya jumlah industri kecil di Sidoarjo yang merupakan produk unggulan daerah salah satunya adalah industri kecil batik. Tidak bisa dipungkiri masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh industri kecil batik, salah satunya adalah rendahnya sumber daya manusia.

Pemerintah melalui Diskoperindag dan ESDM Kabupaten Sidoarjo melakukan suatu pembinaan dan pemberdayaan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh industri kecil batik di Kampoeng Batik Jetis. Adapun pembinaan yang dilakukan, yaitu: (1) Pembinaan pengembangan sumber daya manusia, dan (2) Pembinaan peningkatan kemampuan teknologi. Pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan yaitu berupa pelatihan desain dan motivasi kewirausahaan akan tetapi pembinaan tersebut belum menyeluruh dilakukan kepada pengrajin batik di Kampoeng Batik Jetis. Pembinaan peningkatan kemampuan teknologi yang berupa kemampuan teknologi dalam produksi batik dan kemampuan teknologi dalam pemasaran. Hasil dari pelatihan tersebut belum optimal karena kurangnya kesadaran pengrajin batik untuk mengikuti pelatihan.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Diskoperindag dan ESDM Kabupaten Sidoarjo yaitu: (1) Fasilitasi akses permodalan, dan (2) Fasilitasi pemasaran. Diskoperindag dan ESDM Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan Bank Jatim untuk masalah akses permodalan. Kemudian untuk memberikan fasilitasi pemasaran Diskoperindag dan ESDM mengadakan pameran, promosi dan misi dagang yang sudah berjalan dengan baik dan hasilnya cukup memuaskan.

2. Manfaat dan Dampak yang dihasilkan dari Pembinaan dan Pemberdayaan Pengrajin Batik di Kampoeng Batik Jetis Kabupaten Sidoarjo

Manfaat yang dihasilkan dari pembinaan dan pemberdayaan pengrajin batik Kampoeng Batik Jetis yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan serta motivasi yang lebih tinggi untuk terus mengembangkan usahanya. Sedangkan dampak yang dihasilkan dari pembinaan dan pemberdayaan yaitu pemasaran semakin meluas, desain yang semakin inovatif, meningkatkan jumlah produksi dan kualitas produk yang semakin bagus.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Mempengaruhi dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Pengrajin Batik di Kampoeng Batik Jetis Kabupaten Sidoarjo

Faktor pendukung internal dalam pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan Diskoperindag dan ESDM antara lain: (1) Adanya akses teknologi yang membantu pegawai Diskoperindag dan ESDM untuk melakukan peninjauan perkembangan industri pengrajin batik. (2) Adanya kerja sama antara pemerintah dengan BUMN yang menjadikan Diskoperindag dan ESDM lebih mudah untuk melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan. Faktor pendukung Eksternal, antara lain: (1) Produk yang sudah dikenal masyarakat. (2) Adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Adanya faktor penghambat Internal dari pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan Diskoperindag dan ESDM antara lain: (1) Struktur organisasi yang tidak terintegrasi, pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan tupoksi. (2) Terbatasnya dana yang menjadikan kurang optimalnya pembinaan dan pemberdayaan pengrajin batik. Faktor penghambat eksternal yaitu: (1) Kurangnya kesadaran pengrajin batik untuk mengikuti pelatihan yang diberikan Diskoperindag dan ESDM Kabupaten Sidoarjo dan (2) Minimnya tenaga kerja pada industri kecil batik.

Kesimpulan

Upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mendukung pertumbuhan industri kecil terutama pengrajin batik Kampoeng Batik Jetis yaitu dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan. Hasil dari pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Diskoperindag dan ESDM Kabupaten Sidoarjo sudah memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi pengrajin batik. Akan tetapi, dampak baik tersebut belum merata dirasakan oleh seluruh pengrajin batik dikarenakan pembinaan dan pemberdayaan belum menyeluruh dilakukan kepada semua pengrajin batik di Kampoeng Batik Jetis.

Saran

1. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan pendataan terhadap pengrajin batik di Kampoeng Batik Jetis yang pernah mengikuti atau pun yang belum pernah mengikuti pembinaan dan pemberdayaan agar tidak salah sasaran dalam proses pembinaan dan pemberdayaan.
2. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan diagnosa kesehatan industri yang harus dilakukan oleh tenaga pendamping yang ahli dalam bidang industri. Diagnosa kesehatan industri akan menganalisis kebutuhan yang dibutuhkan industri kecil pengrajin batik sehingga pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan industri pengrajin batik.
3. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo sebaiknya tidak perlu berubah-ubah karena dengan perubahan yang sering terjadi justru menjadi penghambat dalam keberlanjutan program dan strategi yang dilaksanakan.
4. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan evaluasi program. Selama ini yang sering dilakukan oleh Diskoperindag dan ESDM hanya evaluasi keuangan akan tetapi evaluasi program tidak pernah dilaksanakan..
5. Sumber daya manusia di dalam Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo sebaiknya bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Daftar Pustaka

- Hidayat, S. (1985). **Pembinaan Generasi Muda**. Surabaya: Studi Group.
- Mangunhardjono, A. (1986). **Pembinaan arti dan Metodenya**. Yogyakarta: PN Kanisius.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko, Soebiato. (2012). **Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik**. Bandung: Alfabeta.
- Marto, Agus. (2013). **Perekonomian RI ditopang oleh Sektor UMKM**. Diakses melalui <http://kabarbisnis.com/read/2841689>. Diakses pada 15 September 2013.
- Musman, Asti dan Ambar, Arini. (2011). **Batik: Warisan Adiluhung Nusantara**. Yogyakarta: G-Media.
- Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil**, Jakarta, Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah** (c.14), Surabaya, Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Timur.
- Sugiyono. (2013). **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. (2004). **Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan**. Yogyakarta: IKAPI.
- Suryono, Agus. (2006). **Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial**. Malang: Universitas Negeri Malang (UM Press).
- Suryono, Agus dan Nugroho, Trilaksono. (2008). **Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah**. Malang: Bayumedia Publishing.
- Tambunan, Tulus. (2002). **Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting**. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Industri** (c.1), Jakarta, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah** (c.1), Jakarta, Bank Indonesia.
- Wulandari, Ari. (2011). **Batik Nusantara: Makna Filosofis, Cara Pembuatan dan Industri Batik**. Yogyakarta: ANDI.